

OMBUDSMAN KEPRI NILAI KONSEP ASRAMA SEKOLAH RAKYAT SD PERLU DIEVALUASI

Jum'at, 19 Desember 2025 - kepri

Batam (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai perlu diadakan evaluasi untuk konsep *boarding school* (sekolah berasrama) pada Sekolah Rakyat bagi anak usia Sekolah Dasar (SD), terutama yang berada di bangku kelas 1-3 SD, agar sesuai dengan kesiapan usia anak.

"Ke depan perlu ditinjau ulang, terutama untuk anak kelas 1 sampai 3 SD yang mengikuti sistem *boarding school*. Dari temuan kami, usia tersebut relatif sulit beradaptasi dan tak betah," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari saat dikonfirmasi di Batam, Rabu.

Ia menjelaskan pada praktiknya banyak siswa usia dini yang tidak betah tinggal di asrama. Di Tanjungpinang dan Natuna, sebagian anak memilih pulang dan bahkan dijemput orang tuanya karena belum siap berpisah.

"Anak umur 6-7 tahun itu rata-rata belum siap *boarding*. Ada yang baru beberapa waktu sudah minta pulang," katanya.

Ia menyampaikan saat ini Sekolah Rakyat belum ada di Batam dan tidak direncanakan berdiri di kota tersebut. Hingga kini program ini baru berjalan di tiga wilayah, yakni Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas.

Ia mengatakan Sekolah Rakyat Tanjungpinang, dari kuota 100 siswa, tercatat sekitar 25 anak mengundurkan diri dan meminta pulang. Saat ini pihak sekolah masih mencari pengganti.

Kondisi serupa sempat terjadi di Natuna, kata dia, meski kini jumlah siswa kembali hampir penuh dengan sekitar 95 anak setelah dilakukan penggantian.

Berdasarkan kondisi tersebut, Ombudsman Kepri mendorong agar ke depan sistem sekolah berasrama lebih difokuskan pada siswa kelas 4 hingga 6 SD. Sementara untuk kelas 1-3, pola pendidikan *non-boarding* dinilai lebih sesuai.

"Sarana dan prasarana relatif baik, anak-anak mendapat fasilitas lengkap seperti laptop dan seragam. Namun persoalan utama tetap pada kesiapan usia anak untuk sistem *boarding*," katanya.